**ABSTRAK**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penelitian ini berjudul **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat**. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetehaui, mendeskripsikan dan menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Bupati no. 60 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi factor penghambat peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan magang yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analis data mengambil teori mile dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan saran. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Pengurus kelompok pedagang kaki lima, pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan, bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah mengenai penataan dan penerrtiban pedagang kaki lima di Kabupaten Sumedang masih belum maksimal, namun dalam pelaksanaannya berupaya untuk lebih ditingkatkan dan harus ada upaya-upaya yang baru yang lebih efisien dan efisien demi ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan adanya faktor-faktor pendukung dalam melaksanakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima. Seharusnya penataan dan penertiban tersebut berjalan dengan baik. Akan tetapi setelah penulis mengamati secara langsung ternyata masih banyak kekurangan, Pemerintah harus lebih mendukung dan meningkatkan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan dan penertiban PKL. Faktor-faktor penghambat inilah yang menyebabkan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima belum maksimal. Seharusnya dilakukan peningkatan kualitas SDM dan kelengkapan sarana dan prasarana bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang agar tercipta aparatur yang professional yang mampu bekerja dengan baik dan bertanggungjawab serta pelaksanaan penataan dan penertiban yang dilakukan dapat berjalan dengan apa yang diharapkan sesuai dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja.

**Kata Kunci : Peranan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima**

***ABSTRACT***

*The Civil Service Police Unit is a regional apparatus tasked with enforcement of Regional Regulations (Perda) and the implementation of public order and public order. This research entitled Role of Civil Service Police Unit In Arranging and Controlling Traders of Legs In Sumedang Regency West Java Province. The purpose of this study is to understand, describe and analyze the role of the Civil Service Police Unit in upholding the Regent's Decree no. 60 year 2013 on structuring and empowering street hawkers, to know the supporting factors and obstacles role of Civil Service Police Unit in structuring and controlling street hawkers and efforts made to increase the role of Civil Service Police Unit in overcoming the obstacle factor role of Police Unit Pamong Praja in structuring and controlling street vendors.*

*The research method used is qualitative research descriptive method with inductive approach. For data collection techniques used in the apprenticeship are interview techniques and documentation. As for the technique of data analysts take the mile theory and Huberman is data reduction, data presentation and conclusion suggestions. The informants in this study were the Head of the Civil Service Police Unit, the Secretary of the Civil Service Police Unit, the Head of Public Order and Public Affairs, the Head of Law Enforcement Sector, the Management of the street hawkers group, the street hawkers.*

*Based on the results of research conducted by the authors it can be concluded, that the role of Satuan Pamong Praja Police Unit in enforcing the Regional Regulations on the arrangement and pengrtiban street vendors in Sumedang regency is still not maximized, but in its implementation seeks to be improved and there should be new efforts that more efficient and efficient for the sake of public order and tranquility. With the supporting factors in implementing the arrangement and control of street vendors. The structuring and control should work well. However, after the author observes directly there are still many shortcomings, the Government should be more supportive and improve the Role of Civil Service Police Unit in structuring and controlling street vendors. Inhibiting factors is what causes the Role of Civil Service Police Unit in structuring and controlling street hawkers has not been maximized. It should be done to improve the quality of human resources and the completeness of facilities and infrastructure for the Police Unit of Civil Service District Sumedang in order to create professional apparatus that is able to work properly and responsibly and the implementation of structuring and control can be done with what is expected in accordance with the Role of Civil Service Police Unit.*

***Keywords: Role, Civilian Police Unit, Street Traders***